

**Judul** : Perluah TNI dilibatkan untuk berantas aksi begal  
**Tanggal** : Kamis, 28 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Perluah TNI Dilibatkan Untuk Berantas Aksi Begal

Wacana pelibatan anggota TNI untuk membantu memberantas aksi begal mendapat sorotan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemertan), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan keterlibatan TNI dalam membantu memberantas aksi begal merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun, dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah dan Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Rico saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa (26/5). Pernyataan tersebut disampaikan Rico saat menanggapi langkah Kodam Jaya yang mengaharakan batalion tempur untuk membantu Polri menangan-

maraknya aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

MUHAMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

### Sekarang Ini, Aksi Begal Sudah Mengkhawatirkan Bertentangan Dengan Semangat Reformasi



“

Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi antarinstitusi.

“

Negara seharusnya memperkuat profesionalisme kepolisian dan kapasitas Pemerintah Daerah, bukan terus-menerus menjadikan TNI sebagai solusi instan atas setiap persoalan sipil.



Belakangan ini, aksi begal di beberapa daerah sudah mengkhawatirkan. Ada wacana pelibatan TNI dalam memberantas aksi begal. Apa pendapat Anda? Kami memahami keresahan masyarakat atas maraknya aksi begal di Jakarta maupun di sejumlah daerah lain. Keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan negara memang memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa rasa takut.

Soal pelibatan TNI dalam mengantisipasi begal, bagaimana? Dalam konteks pelibatan TNI, tentu perlu dilihat secara proporsional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TNI pada prinsipnya memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertibatan masyarakat berada dalam ranah kepolisian. Karena itu, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.

Namun, menurut Anda, pada momen apa TNI bisa dilibatkan? Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, TNI dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Apa catatan Anda terkait wacana ini? Pelibatan tersebut tentu harus

terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi antarinstitusi.

Apa yang dilakukan Komisi I dalam menanggapi hal ini? Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata. Aparat harus mampu memberikan rasa aman, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi masyarakat.

Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antar lembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertibatan masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing. ■ REN

Apa pandangan dan pendapat Anda mengenai adanya wacana pelibatan TNI dalam mengatasi begal di beberapa daerah? Pelibatan TNI untuk mengatasi begal di Jakarta adalah bentuk respons berlebihan dan menyimpang dari fungsi TNI. Rencana pengeralihan batalion tempur oleh Kodam Jaya untuk memumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkannya pendekatan represif dan kekerasan berlebihan di ruang sipil.

Menurut Anda, pelibatan TNI tidak diperlukan? Pelibatan TNI dalam penanganan begal sejatinya tidak diperlukan. Kehadiran aparat tempur di ruang sipil justru berpotensi meningkatkan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, memperbesar risiko pelanggaran HAM, dan memper-

lihatkan kegagalan negara dalam memperkuat institusi sipil yang memang diberi kewenangan menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-

kan aksi begal di sejumlah wilayah Jakarta. Menurut Rico, langkah yang dilakukan Kodam Jaya bertujuan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Upaya itu dilakukan melalui patroli bersama, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, hingga berbagai tindakan pencegahan lainnya. Ia juga menyebut langkah Kodam Jaya selaras dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan Yonif TP di berbagai daerah untuk membantu melindungi masyarakat dari beragam aksi kriminalitas. Meski demikian, Rico menegaskan TNI memiliki batasan dalam menangan-